

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara *etimologis*, politik berasal dari bahasa Yunani, *polis*. Politik sering diartikan sebagai Negara Kota (*city state*). Kata *polis* memiliki banyak derivasi, seperti "*polities*" (warga negara) yang dalam bahasa Inggris disebut *citizen* dan "*politicos*" yang berarti kewarganegaraan (*civic*). Politik merupakan seni mengatur kolektivitas, yang terdiri atas beragam individu berbeda melalui serangkaian undang-undang yang disepakati bersama.¹

Pengertian politik di atas memiliki relevansi dengan konsep politik lokal (*local Politics*). Relevansi tersebut tak lain adalah interaksi sosial dalam ruang tertentu. Politik lahir berawal dari interaksi sosial dalam sebuah ruang, yang kemudian melahirkan lembaga politik seperti negara dan berbagai institusinya.²

Dinamika politik lokal di Indonesia selalu berubah sepanjang waktu. Pada era sebelum kemerdekaan, politik lokal di Nusantara menunjukkan potret buram karena penguasa memperoleh kekuasaan dalam kerangka hukum adat yang totaliter. Akibatnya sebagian masyarakat yang totaliter. Akibatnya sebagian besar lapisan masyarakat hanya diakui sebagai hamba (bukan warga) yang tidak pernah menjadi subjek pembangunan semasa itu.

¹ Dr. H. Abd. Halim, M.Ag. (2018). *Politik Lokal Aktor, dan, Problem, dan Konflik dalam Arus Demokratisasi*. Malang: Intrans Publishing, h.1.

² *Ibid.*, h. 4.

Masyarakat dijadikan objek dari kehidupan politik yang tidak berpihak kepada mereka.

Pemerintahan daerah merupakan pelaksana fungsi pemerintahan di daerah yang dilakukan oleh dua lembaga pemerintahan daerah yaitu, pemerintah daerah dan DPRD. Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukan setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa di antara lembaga pemerintahan daerah memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi. Hal ini tercermin dalam membuat kebijakan daerah bahwa pemerintah daerah dan DPRD adalah mitra kerja untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing. Sehingga antara kedua lembaga itu membangun kerja sama yang sifatnya saling mendukung bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain.³

Proses peralihan dari sistem dekonsetrasi ke sistem desentralisasi disebut pemerintah daerah dengan otonomi. Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Tujuan otonomi adalah mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat.

Desentralisasi yang tujuannya untuk pengembangan daerah secara mandiri justru lebih didominasi oleh pertarungan elite politik maupun elite birokrasi. Monopoli kekuasaan di daerah-daerah tertentu juga

³ Khairul Ikhwan Damanik, (2010). *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, h. 118.

menambah catatan hitam desentralisasi di Indonesia. Akibatnya desentralisasi justru menjadi identik dengan oligarki pada tatanan lokal.

Selain itu, adanya desentralisasi oleh para elite politik justru menjadi Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional. Tujuan otonomi adalah mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan urusan ini adalah antara lain: menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.⁴

Desentralisasi adalah pendelegasian wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan kepada orang-orang pada level bawah pada suatu organisasi. Pada sistem pemerintahan yang terbaru tidak lagi menerapkan sistem pemerintahan sentralisasi, melainkan sistem otonomi daerah atau otda yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan.

Daerah diarahkan untuk membangun pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Banyak

⁴ Prof. Drs. HAW. Widjaja, (2009). *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, h. 22.

daerah yang memiliki sumber daya alam yang cukup potensial sehingga konsekuensi logisnya ialah memberikan kewenangan kepada daerah dalam pengelolaan, sesuai dengan maksud dan tujuan otonomi daerah tersebut.

Dengan demikian desentralisasi berupaya untuk mencegah penumpukan kekuasaan di suatu daerah. Mengefisiensikan sistem pemerintahan, penempatan budaya lokal serta pemanfaatan potensi sumber daya alam, dan juga secara kolektif pemerintah daerah harus lebih fokus dalam melakukan pembangunan di daerahnya.⁵

Tentulah tidak mudah mengatur dan mengidentifikasi setiap aspirasi masyarakat yang berada sangat jauh dengan pemerintahan di Ibu Kota, belum lagi keberagaman dan pola nalar psikologisnya yang tidak dapat diprediksi. Sehingga pemerintahan sentralistik tidak mampu menghadirkan narasi yang tidak terlihat tersebut. Politik lokal di sini kemudian menjadi formula yang tepat untuk mengatur rakyat pada aspek Pemerintahan daerah. Barulah politik lokal terwujud sebagaimana halnya demokrasi yang bisa memahami latar belakang historis dan psikologis pada setiap rakyat suatu Negara. Politik lokal yang dimaksud adalah aktivitas politik pada skala atau ruang terkecil dalam Negara sebagai Pemerintahan daerah.

⁵ Khairul Ikhwan Damanik, Op.Cit, h. 78

Studi-studi sebelumnya mengungkapkan wacana pemekaran muncul kepermukaan yang juga menjadi alasan utama mengapa sebuah daerah ingin untuk melakukan pemekaran daerah, yaitu:⁶

1) Kebutuhan untuk pemerataan ekonomi daerah

Menurut data IRDA (Indonesia Rapid Desentralization Appriaisal), kebutuhan untuk pemerataan ekonomi menjadi alasan paling populer digunakan untuk memekarkan suatu daerah. Misalnya kasus pemekaran Minahasa Utara di Sulawesi Utara.

2) Kondisi geografis yang terlalu luas.

Banyak kasus di Indonesia, proses Delivery pelayanan publik tidak pernah terlaksana dengan optimal karena infrastruktur yang tidak memadai. Akibatnya luas wilayah yang sangat luas membuat pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik tidak efektif.

3) Perbedaan basis identitas

Alasan perbedaan identitas (etnis, asal muasal keturunan) juga muncul menjadi salah satu alasan pemekaran. Tuntutan pemekaran muncul karena biasanya masyarakat yang berdomisili di daerah pemekaran merasa sebagai komunitas budaya tersendiri yang berbeda dengan komunitas induk.

⁶ Praktikno dan Hasrul Hanif, "Kerangka Pikir Kebijakan Pemekaran", dalam Perjuangan Menuju Puncak: Kajian Akademik Rencana Pembentukan Kabupaten Puncak, Politik Lokal dan Otonomi Daerah Universitas Gajha Mada.

4) Kegagalan Pengelolaan Konflik Komunal.

Kekacauan politik yang tidak bisa diselesaikan seringkali menimbulkan tuntutan adanya pemisahan daerah seperti pada kasus usulan pembentukan Sumbawa Barat di Nusa Tenggara Barat dan Wacana pembentukan Provinsi Sulawesi Timur dan sebagainya.

Pemekaran daerah, seperti kabupaten, dipecah menjadi beberapa kabupaten sebenarnya merupakan tindakan yang baik jika konsep awal dalam otonomi daerah di terapkan, yaitu dalam rangka pemerataan pembangunan daerah. yang dikhawatirkan malah sebaliknya, dan akan menguntungkan beberapa kelompok dan golongan saja. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan ketika sudah muncul rencana pemekaran daerah, muncul pula beberapa tokoh-tokoh politik, agama, masyarakat, pemuda, akademisi, militer, dan pengusaha yang seolah-olah ikut andil dalam proses pemekaran.

Hal itu terjadi karena memang kepentingan golongan yang harus terlaksana bukan keinginan masyarakat. Biasanya mereka selalu menjual isu yang sama kepada masyarakat lapisan tingkat bawah seperti, peningkatan kualitas pendidikan, mempermudah administrasi, pemerataan pembangunan, dan menambah peluang kerja bagi para pemuda.⁷ Isu yang terkait dengan otonomi daerah yang tak kalah penting dengan isu lain adalah isu tentang pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) atau dikenal dengan pemekaran daerah.

⁷ Khairul Ikhwan Damanik, Op.Cit, h. 105

Pemekaran kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan. Pemekaran wilayah Provinsi Sumatera Selatan diharapkan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memberikan kemampuan dalam memanfaatkan potensi wilayahnya untuk penyelenggaraan otonomi daerah, khususnya bagi kabupaten dan kota yang mengalami pemekaran wilayah.

Pemekaran wilayah dimungkinkan apabila ternyata hasil pemekaran tersebut mampu mendorong proses pembangunan disuatu wilayah menjadi lebih efisien. Hal ini berarti dengan otonomi yang diperoleh, masyarakat diberi kewenangan untuk mengelola sumberdaya alamnya sendiri sehingga diharapkan bisa berdampak positif bagi peningkatan dan perkembangan aktivitas perekonomian wilayah.

Seberang Ulu merupakan salah satu wilayah bagian timur di Kota Palembang. Ada 5 kecamatan yang ada di seberang ulu yaitu, Seberang Ulu 1, Seberang Ulu 2, Kertapati, Jakabaring, dan Plaju. Luas wilayah dan banyaknya aset penting di wilayah seberang ulu membuat keinginan Masyarakat Kota Palembang untuk membentuk daerah otonomi daerah dalam rangka pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Selain alasan tersebut menurut peneliti kemungkinan adanya alasan lain yaitu adanya kepentingan para elit lokal baik elit politik maupun non politik.

Rencana pemekaran wilayah Seberang Ulu sudah sejak 10-15 tahun silam telah diwacanakan oleh tokoh masyarakat untuk ada pemekaran, namun

sampai saat ini pemekaran wilayah Seberang Ulu tersebut tak kunjung terlaksana padahal aspirasi pemekaran ini disambut baik oleh pemerintah. Jika dilihat dari perspektif politik lokal, rencana pemekaran wilayah ini semakin diperlambat dengan kepentingan-kepentingan politik tertentu.

Rencana Pemekaran wilayah Seberang Ulu telah menciptakan dinamika kekuatan politik tertentu di Kota Palembang. Dinamika tersebut terlihat ketika terdapat banyaknya perbedaan pandangan dan konsep tentang rencana pemekaran Seberang Ulu. Salah satu contohnya perbedaan pandangan antara Tim P3KPU dan Pemerintahan di Kota Palembang tentang layak atau tidak layak wilayah Seberang Ulu ini dimekarkan. Walaupun saat ini sudah mencapai kesepakatan, namun keduanya saat itu kukuh untuk memenangkan suaranya dengan dasar asumsi masing-masing pihak.

Pemekaran suatu daerah atau desa seharusnya lahir dari keinginan masyarakat yang telah dimusyawarkan dan di sepakati bersama dengan alasan mendasar untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga rencana pemekaran yang di dengungkan akan mencapai tujuannya dan tidak akan terhenti pada kepentingan politik semata.

Pemekaran daerah dalam tatanan filosofis dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,⁸ hal inipun secara tegas diatur

⁸ Undang-Undang No. 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah Pasal 2.

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007.⁹ Uraian tersebut mencerminkan bahwa alasan utama yang menuntut daerah untuk dimekarkan secara umum berkaitan dengan alasan ekonomi dan pemerataan pembangunan.

Pemekaran wilayah harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan (Pasal 5 (1)). Syarat administratif untuk provinsi meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan bupati/walikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi, persetujuan DPRD provinsi induk dan gubernur, serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri. Syarat administratif untuk kabupaten/kota meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan bupati/walikota yang bersangkutan, persetujuan DPRD provinsi dan gubernur serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri.

Sedangkan syarat teknis meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Syarat fisik meliputi paling sedikit 5 (lima) kabupaten/kota untuk pembentukan provinsi dan paling sedikit 5 (lima) kecamatan untuk pembentukan kabupaten, dan 4 (empat) kecamatan untuk

⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah Pasal 22 Ayat (1)

pembentukan kota, lokasi calon ibukota, sarana, dan prasarana pemerintahan.¹⁰

Oleh karena itu, bukan berarti apabila suatu daerah telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan fisik kewilayahan maka dengan sendirinya pemekaran wilayah dapat dilakukan. Hal ini disebabkan oleh adanya persyaratan jangka waktu jalannya pemerintahan induk. Ada batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan untuk dapat melakukan pemekaran wilayah.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis bermaksud mengadakan sebuah penelitian lewat penulisan skripsi yang dikemas dalam judul, **“Rencana Pemekaran Wilayah Seberang Ulu dalam Perspektif Politik Lokal”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas, peneliti merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana dinamika pemahaman masyarakat terhadap rencana pemekaran Wilayah Seberang Ulu ?
2. Bagaimana rencana pemekaran Wilayah Seberang Ulu dalam perspektif politik lokal ?

¹⁰ Surya Dwi Saputra, (2013). *Persepsi Masyarakat Tentang Kesejahteraan Masyarakat*, Jurnal FKIP UNILA. Vol. 1, No. 8. h.13.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dinamika pemahaman masyarakat terhadap rencana pemekaran Wilayah Seberang Ulu.
2. Untuk mengetahui rencana pemekaran Wilayah Seberang Ulu dalam perspektif politik lokal.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian, serta tambahan literatur dalam pengembangan keilmuan bidang ilmu politik dan memberi sumbangan kajian mengenai fenomena baru yang berkaitan dengan rencana pemekaran Wilayah Seberang Ulu dalam perspektif politik lokal.

2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan oleh civitas akademika UIN Raden Fatah Palembang, para peneliti, praktisi bidang ilmu politik, dan para pengamat politik mengenai rencana pemekaran Wilayah Seberang Ulu dalam perspektif politik lokal.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang dinamika politik lokal dalam rencana pemekaran wilayah seberang ulu belum pernah dilakukan sebelumnya. Namun ada beberapa penelitian menurut peneliti dapat dijadikan rujukan sebagai pembanding, acuan, dan referensi bagi penelitian yang sedang dilakukan. Berkaitan dengan judul peneliti diatas, penelitian yang menjadi rujukan bagi

peneliti antara lain penelitian oleh oleh Jauhari Mahmudi, Linggar Audia, Sudirman, Tri Banjir Adi Wijoyo, Welhelmina Selfina Beli, dan Nur Syahdan.

Penelitian oleh Jauhari Mahmudi dalam *Dinamika Politik Pemekaran Kecamatan Gayam di Kabupaten Bojonegoro*.¹¹ Pada penelitian ini dijelaskan bahwa, Pemekaran Kecamatan Gayam tidak terlepas dari peran dan kepentingan para elite lokal setempat, dimana dibalik pemekaran tersebut terdapat motif untuk mempersempit pembagian Csr proyek migas. Para elite lokal Gayam berinteraksi dalam bentuk forum komunikasi. Hasil dari interaksi tersebut adalah keberhasilan merubah sikap enam desa eks-Kalitidu dari yang awalnya keberatan menjadi bersedia masuk dalam wilayah Gayam.

Kemudian interaksi para elite lokal juga berhasil membangun relasi baik antara kecamatan induk dengan kecamatan pemekaran berupa relasi bagi-bagi proyek di kawasan Gayam, Ngasem dan Kalitidu. Selain itu, interaksi para elite lokal Gayam juga berhasil mendorong pemerintah untuk menelurkan Perda Konten Lokal sebagai back up bagi warga dan kontraktor lokal untuk dilibatkan dalam proyek migas.

Penelitian dari Jauhari Mahmudi ini memang membahas tentang dinamika politik dalam pemekaran wilayah tetapi tidak mengangkat permasalahan yang sama dengan penelitian yang peneliti angkat, yaitu

¹¹ Jauhari Mahmudi, Skripsi. (2015), *Dinamika Politik Pemekaran Kecamatan Gayam di Kabupaten Bojonegoro*, Surabaya: Universitas Airlangga.

tentang dinamika politik lokal dalam rencana pemekaran wilayah Seberang Ulu.

Penelitian oleh Linggar Audia dalam *Analisis Politik Terhadap Usulan Pemekaran Desa Sidaraja Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan*.¹²

Pada hasil penelitian ini dijelaskan bahwa Proses politik dari rencana pemekaran Desa Sidaraja terdiri beberapa tahap yang pertama yaitu penjangkaran aspirasi yang datang dari aspirasi masyarakat dan alasan politis kemudian pembentukan panitia pemekaran desa, lalu penyusunan raperda hingga disahkannya menjadi perda.

Selanjutnya ada pula hambatan hambatan dari rencana pemekaran desa ini sendiri yang mengakibatkan batalnya rencana dari pemekaran Desa Sidaraja diantaranya kepentingan politik dan Individu dimana adanya unsur ketidakpedulian terhadap kepentingan masyarakat dan lebih mementingkan jabatan politik dan kekuasaan serta proses pembahasan DPRD yang begitu lama yang dapat membuat terjadinya pesimistis di kalangan masyarakat.

Dinamika politik yang ada dalam rencana pemekaran desa Sidaraja sangat rumit dari hubungan legislative dan eksekutif, lembaga dengan pihak panitia pemekaran desa semua saling berhubungan. Komunikasi yang tidak baik antar lembaga yang terkait dalam rencana pemekaran desa ini menjadi gambaran bagaimana buruknya proses pemekaran desa ini.

¹² Linggar Audia, (2015). *Analisis Politik Terhadap Usulan Pemekaran Desa Sidaraja Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan*, Journal of Politics and Government Studies, Vol. 04, No. 02, Semarang: Univesitas Diponegoro

Penelitian ini menganalisa politik terhadap usulan pemekaran wilayah di desa sidaraja, penelitian oleh Linggar Audia tidak mengangkat masalah dinamika politik lokal dalam rencana pemekaran wilayah sehingga fokus dari kedua penelitian ini berbeda.

Penelitian oleh Sudirman dalam *Dinamika Politik Lokal dalam Social Capital (Modal Sosial)*.¹³ Melalui hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Dimensi politis manusia adalah dimensi masyarakat sebagai keseluruhan dengan ciri khasnya bahwa pendekatan itu terjadi dalam kerangka acuan yang berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan. Pilkada langsung adalah sebuah ruang yang diperuntukkan bagi perwujudan nilai tertinggi dari esensi politik manusia dalam sebuah wilayah tertentu yaitu pemegang utama dari legakitas akan sebuah kedaulatan.

Sebuah hasil pemilu, seharusnya dapat menjadi solusi atas transisi kepemimpinan atau pergantian kepemimpinan secara lebih elegan dan damai. Selain itu, proses pemilu tersebut, dapat memberikan gambaran akan potensi dan akuntabilitas serta kompetensi dari kandidat yang terpilih secara demokratis.

Mengapa demikian, ini dikarenakan bahwa sistem rekrutmen kepemimpinan melalui mekanisme pemilu ini merupakan proses rekrutmen yang terpola dan menjanjikan akan sebuah kualitas dan

¹³ Sudirman, (2012). *Dinamika Politik Lokal dalam Social Capital (Modal Sosial)*, Jurnal Academica Fisip Untad, Vol. 04 No. 01, Palu: Universitas Tadulako.

kompetensi yang dijanjikan akan dapat terealisasi disana. Meskipun dalam penelitian ini dibahas tentang dinamika politik lokal namun tidak dalam konteks rencana pemekaran wilayah melainkan dinamika politik lokal dalam modal sosial. Sehingga fokus dari kedua penelitian ini berbeda.

Penelitian Tri Banjar Adi Wijoyo dalam *Pemekaran Desa Ditinjau dari Aspek Otonomi Daerah di Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur*.¹⁴

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pemekaran wilayah desa adalah sebagai sebuah terobosan untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan bagi masyarakat, maka dari itu penelitian ini bertujuan memperlihatkan proses pemekaran wilayah desa di tinjau dari aspek otonomi daerah. Meskipun penelitian ini membahas tentang pemekaran wilayah, tetapi penelitian ini tidak mengangkat permasalahan tentang dinamika politik lokal.

Penelitian oleh Welhelmina Selfina Beli dalam *Peran Elite Politik Lokal dalam Upaya Mendukung Pemekaran Kabupaten Pantar Provinsi NTT*.¹⁵ Pada hasil penelitian ini dijelaskan bahwa dengan kekuasaan yang dimiliki oleh para elite kemudian berusaha membangun kekuatan untuk mencapai tujuan mereka, namun ada elite yang akhirnya harus kalah dalam pertarungan kekuasaan di Kabupaten Alor. Para elite ini adalah Bupati, Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Anggota DPRD Kabupaten Alor Para

¹⁴ Tri Banjar Adi Wijoyo, Skripsi. (2013), *Pemekaran Desa Ditinjau dari Aspek Otonomi Daerah di Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur*, Makasar: Universitas Hasanuddin.

¹⁵ Welhelmina Selfina Beli, (2016). *Peran Elite Politik Lokal dalam Upaya Mendukung Pemekaran Kabupaten Pantar Provinsi NTT*, Jurnal Politika, Vol. 06, No. 02, Semarang: Universitas Diponegoro.

elite politik lokal berusaha untuk menjadikan pemekaran sebagai sarana agar bisa dijadikan modal dalam memperoleh kekuasaan.

Isu pemekaran Kabupaten Pantar telah menjadi barang jualan oleh elite politik lokal di Kabupaten Alor. Para elite menggunakan kekuasaan yang mereka miliki untuk bisa memperjuangkan pemekaran daerah kabupaten Pantar sebagai sebuah perjuangan aspirasi masyarakat yang harus mendapat perhatian dari pemerintah. Elite politik lokal sebagai ujung tombak kesejahteraan masyarakat di daerah tidak melihat apa kebijakan yang tepat demi kesejahteraan masyarakat.

Pergantian elite mengakibatkan mutasi dan promosi dalam jajaran pemerintahan daerah. Para elite baru yang berkuasa menjalankan kebijakan daerah dengan semauanya dengan terus menjadikan pemekaran sebagai kekuatan dalam mendapatkan kedudukan politik. Meskipun penelitian ini membahas tentang pemekaran wilayah tetapi penelitian ini tidak mengangkat tentang dinamika politik lokal.

Penelitian oleh Nur Syahdan dalam *Perencanaan Pemekaran Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis*.¹⁶ Melalui hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam proses pemekaran kecamatan belum terlaksana secara maksimal karena terkendala dengan prosedur kebijakan-kebijakan yang harus diikuti melalui keputusan dan persetujuan dari pemerintah pusat maupun provinsi.

¹⁶ Nur Syahdan, (2017). *Perencanaan Pemekaran Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis*, Jurnal Online Mahasiswa Fisip, Vol. 04, No. 01, Pekanbaru: Universitas Riau.

Desakan dan aspirasi terus disampaikan dari masyarakat dan tim pemekaran agar terlaksananya proses pemekaran secara efektif dan efisien akan tetapi pemekaran kecamatan tersebut tidak kunjung terealisasi padahal proses pemekaran sebenarnya tidak menyulitkan bagi pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis.

Faktor yang mempengaruhi perencanaan Pemekaran Kecamatan Bukit Batu antara lain adalah faktor sumber daya implementator perencanaan pemekaran, faktor waktu atau momentum yang tidak mendukung pembentukan pemekaran kecamatan sesuai dengan perencanaan awal, selanjutnya faktor politis yang mewarnai perencanaan pemekaran Kecamatan Bandar Laksmana. Dalam penelitian ini dibahas tentang perencanaan pemekaran tetapi penelitian ini tidak membahas tentang dinamika politik lokal.

Berdasarkan beberapa tinjauan kepustakaan yang dijelaskan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa ada banyak sekali penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas mengenai pemekaran wilayah. Namun persoalan mengenai dinamika politik lokal dalam rencana pemekaran wilayah Seberang Ulu belum pernah diteliti. Sehingga hal ini merupakan salah satu kelebihan bagi penelitian ini.

Karena belum adanya peneliti yang membahas mengenai dinamika politik lokal dalam rencana pemekaran wilayah Seberang Ulu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang ilmu politik, serta

dapat menjadi referensi bagi peneliti-peneliti lainnya. Khususnya mengenai dinamika politik dalam rencana pemekaran wilayah.

F. Kerangka Teori

1. Pengertian Pemekaran Daerah

Pemekaran daerah adalah salah satu cara pembentukan daerah yang telah di atur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam pasal 1 Ayat 21 Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa “Daerah persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Daerah yang bersanding dan dipersiapkan untuk dibentuk menjadi daerah baru.”

Dapat disimpulkan bahwa pemekaran daerah sebagai salah satu cara untuk membentuk daerah baru. Upaya pemekaran daerah di pandang sebagai sebuah acuan untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan yang baik bagi masyarakat. Pemekaran daerah juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat, sehingga meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan.¹⁷

2. Pengertian Perspektif

Perspektif adalah suatu kerangka konseptual, suatu perangkat asumsi, nilai, atau gagasan yang mempengaruhi persepsi, dan pada gilirannya mempengaruhi cara bertindak dalam suatu situasi. Oleh karena itu, tidak

¹⁷ UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Ayat 21.

ada seorang ilmuwan yang berhak mengklaim bahwa perspektif yang benar atau sah. Meskipun suatu perspektif mungkin lebih mendekati realitas yang dimaksud, tapi pada dasarnya perspektif itu mungkin hanya menangkap keseluruhan realitas yang diamati, jadi suatu perspektif bersifat terbatas, karena hanya memungkinkan manusia melihat satu sisi saja. Jadi dapat disimpulkan bahwa perspektif merupakan suatu pandangan dari suatu dasar pemikiran atau yang menjadi dasar pemikiran.¹⁸

3. Pengertian Politik Lokal

Politik lokal yang dimaknai sebagai seni mengatur kolektivitas yang terdiri atas beragam individu berbeda melalui serangkaian undang-undang yang disepakati bersama. Terminologi ini kemudian berkembang dan bertolak atas aspek realitas bahwa politik berisi orang-orang yang mempunyai latar belakang berbeda. Namun, kondisi di dalam individu mempunyai tujuan-tujuan yang sama, seperti ingin hidup aman, makmur, dan sejahtera. Aturan-aturan yang diciptakan merupakan wujud ikatan politik yang menyatukan berbagai individu dalam mencapai tujuan yang sama.¹⁹

4. Teori Elite Klasik dari Plato

Dalam buku “Teori Perbandingan Politik” yang ditulis oleh Ronald H. Chilcote (2010) dijelaskan, dalil utama dari teori elite klasik adalah “setiap masyarakat suatu minoritas membuat keputusan-keputusan besar. Asal

¹⁸ Dedy Mulyana. 2013, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. h.6.

¹⁹ Abd. Halim. 2014. *Politik Lokal: Pola Aktor, Alur Dramatikalnya*. Yogyakarta: LP2B, h.5.

usul teori ini dari Plato, namun perluasannya terdapat dalam pemikiran dua sosiologi Italia, Villfredo Pareto dan Gaetano Mosca”.²⁰ Untuk memperjelas uraian tentang teori elite, akan dikemukakan beberapa asumsi mendasar yang dipercaya oleh kelompok ilmuwan elitis. Asumsi dibawah ini merupakan penjelasan yang dijabarkan oleh Gaetano Mosca dalam buku “The Rulling Class”.²¹

Pertama dalam setiap masyarakat senantiasa tidak akan terwujud distribusi kekuasaan secara merata, dan siapa yang mendapatkan atau memiliki sumber-sumber tersebut itulah pemilik kekuasaan politik dan jumlah orang yang berkuasa karena memiliki akses yang leluasa terhadap sumber daya lebih sedikit daripada yang tidak. Sedangkan elite politik adalah orang yang memiliki pengaruh besar dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Kedua, berangkat dari orang yang memerintah dalam suatu masyarakat dan negara selalu lebih sedikit daripada yang diperintah, sebab terdapat perbedaan-perbedaan kualitas antara yang memerintah dengan yang diperintah.

Paling tidak menurut Robert Mischels menemukan empat alasan mengapa hal tersebut terjadi :

1. Keahlian administrasi. Tidak semua orang dalam suatu organisasi memiliki kecakapan dalam bidang pelaksanaan tugas yang

²⁰ Chilcote, Ronald. (2010). *Teori Perbandingan Politik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

²¹ Gaetano Mosca. (1989). *The Rulling Class, Elementi di Scienza Politica*. New York and London: McGraw-Hill Book Company Inc.

mengakibatkan adanya spesialisasi dan keahlian, sedangkan masyarakat umum tidak.

2. Para individu memiliki keunggulan intelektual.
3. Pemimpin organisasi akan mendapat rasa hormat dan pemimpinn akan melekat dalam dirinya ketokohan atau identifikasi dengan jabatan atau organisasi yang diikuti.
4. Misalnya dalam keadaan darurat perang, meskipun oligarki akan mendapat dukungan dari masyarakat.

Keempat, antar elite senantiasa bekerjasama untuk mempertahankan *status quo*. Akan terdapat nilai yang diperjuangkan oleh para elite untuk mempertahankan kepentingannya. Sehingga, berbagai ideologi maupun pembenaran kerap dilakukan untuk menjaga keberlangsungan kepentingan elite. Maka, perubahan sosial hanya bisa terjadi ketika para elite tidak lagi kohesif memperjuangkan formula politik atas dominasi mereka.

Elite adalah minoritas yang memiliki kekuasaan. Kelompok kecil itu tidak bukanlah cerminan dari masyarakat non-elite. Elite tersebut diambil secara tidak proposional dari kalangan atas dalam kehidupan sosial masyarakat berdasarkan atribut-atribut kekuasaan tertentu. Di sisi lain, elite memiliki kepentingan yang memang harus dipertahankan sehingga memiliki konsensus terhadap suatu sistem nilai tertentu.

Dalam pengertian yang umum elit menunjuk pada sekelompok orang orang yang ada dalam masyarakat dan menempati kedudukan tinggi.

Dalam pengertian khusus dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang terkemuka di bidang-bidang tertentu dan khususnya golongan minoritas yang memegang kekuasaan. Dalam studi sosial golongan minoritas yang berada pada posisi atas yang secara fungsional dapat berkuasa dan menentukan dikenal dengan elit. Elite adalah suatu minoritas pribadi-pribadi yang diangkat untuk melayani suatu kolektivitas dengan cara yang bernilai sosial.

G. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan atau Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan dasar penelitian survey. Metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu peneliti menggambarkan dan menghasilkan data dalam bentuk rekaman hasil wawancara, transkrip wawancara, catatan hasil pengamatan, dokumen-dokumen tertulis, serta catatan lain yang tidak terekam selama pengumpulan data. Dasar penelitian survey dimaksudkan guna memperoleh gambaran yang jelas mengenai persepsi masyarakat terhadap rencana pemekaran wilayah Seberang Ulu²²

Melalui penelitian deskriptif kualitatif ini, peneliti menggambarkan permasalahan yang terjadi di lapangan sesuai dengan teori dan konsep berdasarkan data yang didapat. Peneliti menggunakan metode dengan

²² Nanang Martono, (2015). Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, h. 11.

tujuan untuk menyelidiki aktivitas dari individu maupun kelompok, berkaitan dengan peristiwa yang sedang diteliti yaitu rencana pemekaran Wilayah Seberang Ulu dalam Perspektif Politik Lokal. Kemudian peneliti memaparkan data yang telah dikumpulkan dalam bentuk rangkaian kata-kata. Penelitian ini dilakukan dengan cara terjun ke lapangan untuk meneliti objek kajian.

2. Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari orang yang terlibat dalam permasalahan yang sedang diteliti. Data primer dalam penelitian ini bersumber dari observasi langsung, mengamati dan mencatat segala sesuatu yang terjadi berkaitan dengan rencana pemekaran Wilayah Seberang Ulu dalam Perspektif Politik Lokal.

Selain itu data primer pada penelitian ini juga diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan yaitu Ketua Presidium P3KPU Bapak Suparman Roman, Anggota DPRD Kota Palembang, Dinas Perindustrian, Bappeda, dan Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat Seberang Ulu. Kepada para informan tersebut diajukan beberapa pertanyaan untuk mencari tahu rencana pemekaran Wilayah Seberang Ulu dalam Perspektif Politik Lokal. Selanjutnya data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau sumber data yang dicatat oleh pihak lain. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa data-data yang berasal dari artikel-artikel dan

karya ilmiah serta berbagai literatur yang mendukung permasalahan seperti buku, majalah, dan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan judul peneliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui metode observasi. Teknik observasi adalahh pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis.²³

Observasi yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah berupa pengamatan terhadap konflik yang terjadi, kepentingan-kepentingan yang ada, dan segala yang berkaitan dengan rencana pemekaran Wilayah Seberang Ulu dalam perspektif politik lokal.

b. Wawancara

Selain metode observaasi, peneliti juga menggunakan wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung.²⁴ Dalam penelitian ini peneliti mengajukan pertanyaan secara lisan kepada seseorang informan atau responden . Adapun yang menjadi informan atau sumber informasi dari penelitian ini adalah Ketua Presidisiium P3KPU yaitu Bapak

²³ Prof.Dr.Husaini, MPd. (2014). *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara), h. 52.

²⁴ Ibid., h. 55.

Suparman Roman, Pemerintahan Provinsi, DPRD Provinsi Sumatera Selatan, dan Tokoh Masyarakat. Ketika melakukan wawancara peneliti juga melakukan perekaman untuk mendokumentasikan pertanyaan - pertanyaan dari informan yang diwawancarai.

c. Dokumentasi

Secara sederhana dokumentasi adalah proses pengumpulan data dari suatu kegiatan yang menyangkut dokumen seperti buku, jurnal, surat kabar, majalah, file, foto, video, atau rekaman suara sebagai bahan komunikasi langsung. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah data dalam bentuk gambar, jurnal, dan data lain yang berhubungan dengan rencana pemekaran Wilayah Seberang Ulu dalam Perspektif Politik Lokal.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. Lokasi ini bisa di wilayah tertentu atau suatu lembaga tertentu dalam masyarakat.

Adapun lokasi penelitian dari penelitian ini adalah Kota Palembang, Sumatera Selatan. Sedangkan fokus dari penelitian ini adalah orang-orang dan segala sesuatu yang terlibat dalam rencana pemekaran Palembang Ulu dalam Perspektif Politik Lokal.

5. Teknik Analisa Data

Analisa data adalah suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan observasi lapangan, dan dokumentasi. Kemudian mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.²⁵ Teknik analisa data yang peneliti gunakan di dalam penelitian ini, antara lain menggunakan 4 tahapan yakni :²⁶

a. Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dari beberapa informan, dan ditambah dengan observasi secara langsung serta dokumentasi. Hasil dari yang diperoleh tersebut kemudian dicatat, dan dikumpulkan.

b. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Selanjutnya, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Pada tahap ini, peneliti menyaring

²⁵ Sugiyono, (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RAD*. Bandung: Alfabeta, h.244.

²⁶ Miles. B.Mathew, dan Michael Huberman, (1992). *Analisi Data Kualitatif* Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru. Jakarta: UI Press, h. 15.

informasi yang di dapat dari informan, dan informasi yang peneliti dapat melalui observasi langsung, sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

c. Penyajian Data

Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan lebih lanjut. Penyajian data cenderung mengarah pada penyederhanaan data kompleks keadaan kesatuan bentuk yang sederhana dan selektif sehingga mudah untuk dipahami.

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan proses untuk merangkum data-data yang telah direduksi atau telah disajikan. Pada tahap ini peneliti bertugas untuk menggambarkan makna dari data yang disajikan. Kesimpulan ini berisi deskripsi atau gambaran dari permasalahan yang diteliti, sehingga tidak terjadi kesalahan makna dalam penyimpulan tersebut.

Bagan 1.1 Teknik Analisa Data



Sumber : Diolah Peneliti

H. Sistematika Penulisan Laporan

Dalam penelitian ini, peneliti membagi sistematika penulisan ke dalam empat bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan tentang pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian yang didalamnya terdapat tipe penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, lokasi penelitian, teknik analisa data, dan sistematika penulisan laporan.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini dibahas mengenai gambaran umum dari lokasi penelitian dalam rencana pemekaran Palembang Ulu dalam perspektif politik lokal. Lokasi dari penelitian ini adalah Kota Palembang, Sumatera Selatan.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, dibahas mengenai proses analisis dari data serta informasi yang sudah diperoleh. Selanjutnya, data-data yang telah didapat akan peneliti analisa dengan menggunakan alat analisis berupa Teori

Elitis Klasik. Sehingga peneliti dapat menjawab perumusan masalah yang terdapat pada bab pertama.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penutup. Terdiri dari kesimpulan dan saran yang merupakan rangkuman dari keseluruhan hasil penelitian.